

## **MANAJEMEN PENCEGAHAN KEJAHATAN BAGI PEGAWAI BP INDONESIA: KEBIJAKAN DEPARTEMEN SEKURITI BP INDONESIA UNTUK MENCEGAH PEGAWAI BP INDONESIA MENJADI KORBAN POTENSIAL**

**Arimadona Duma<sup>1</sup>**  
*arimadona@yahoo.com*

### **Abstract**

*This bachelor thesis tries to explain policies which have been using by BP Indonesia's Security Department as part of multinational oil company to prevent BP Indonesia's Employees from being victimized. Preventing BP Indonesia's Employees from being victimized enable them to show their best and BP Indonesia can regain benefit. Researcher used qualitative method in order to get an in depth and precise data. In order to get an in depth and current analyzes, participant observation, secondary data search, interviews and assessments had been used by researcher. In depth and collaborative analyzed had been used by researcher according to criminological theories such as security management theory, situational crime prevention and social crime prevention theory. Findings suggest that BP Indonesia Security Department have done their job so well that they don't have to increase their security breach in order to prevent the worst. According to experiences and recommendations from BP Indonesia's employees, technical methods needs to be upgraded for the sake of employees comfort.*

*Keywords: crime, crime prevention, security management, situational crime prevention, social crime prevention*

Dewasa ini marak gedung-gedung di Indonesia yang disewakan, mulai dari menjadi tempat parkir, tempat perbelanjaan, pujasera, hingga ruang kantor baik bagi kegiatan organisasi politik atau organisasi non-pemerintahan, dan perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional. Dengan adanya penawaran akan bangunan sebagai salah satu lokasi untuk melakukan pekerjaan oleh perusahaan, maka perlu adanya pihak yang bertanggung jawab atas keamanan perusahaan. Sayangnya perkembangan pembangunan seringkali tidak diikuti dengan perkembangan manajemen dari pemilik gedung tersebut. Sehingga seringkali terdapat tindak kriminal yang menyerang tidak hanya secara fisik gedung-gedung tersebut namun pekerjaanya juga seringkali menjadi korbannya. Secara fisik dapat kita lihat

---

<sup>1</sup> Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

bahwa seringkali terjadi pembobolan, pencurian, hingga pengrusakan kantor maupun pencurian di dalam kantor itu sendiri. Pekerja dari kantor-kantor didalamnya pun seringkali tak luput menjadi sasaran kejahatan. Bila secara fisik bangunan sebagai tempat bekerja tanggung jawabnya dapat diberikan kepada pengelola gedung sehingga perusahaan yang menyewa di dalamnya dapat meminta pertanggungjawaban dari pengelola gedung tersebut. Namun bagaimana dengan keselamatan dan jaminan keamanan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang menyewa ruang kantor di gedung tersebut.

Pekerja ataupun pegawai pada dasarnya adalah orang yang bekerja pada perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta. Bila pegawainya mengalami musibah dengan cara menjadi korban kejahatanpun secara logika, hal tersebut dapat mengurangi kinerja perusahaan, baik dengan cara kehilangan pekerjaanya akibat menjadi korban pembunuhan maupun kecelakaan yang menyebabkan pekerja harus dirawat. Muljadi mengenai Sistem Pencegahan Kejahatan Bagi Tamu Hotel “X” memperhatikan pentingnya untuk memperhatikan kepentingan manusia yang menghuni serta kebutuhannya. Untuk itu Muljadi menerapkan teori strategi pencegahan kejahatan secara situasional sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut secara lebih khusus. Dewi Ranny Riansyah membuat penulisan ilmiah mengenai Strategi Pencegahan Kejahatan di Apartemen “DR” yang memperhatikan keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan oleh penghuninya. Jurnal ini membahas mengenai strategi pencegahan kejahatan situasional yang dimiliki dan diterapkan oleh manajemen Apartemen “DR” untuk melindungi penghuninya dari kemungkinan menjadi korban kejahatan.

Salah satu perusahaan yang menggunakan lahan perkantoran adalah perusahaan minyak multinasional BP Indonesia yang merupakan salah satu anak perusahaan dari British Petroleum/Beyond Petroleum. Kantor pusat perusahaan swasta asing ini terletak di perkantoran hijau arkadia yang mempekerjakan 1200 orang baik pekerja Indonesia maupun warga negara asing. Banyaknya pekerja yang dimiliki oleh BP Indonesia mencerminkan tingginya tanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan dan keamanan mereka. Oleh karena itu, pada BP Indonesia terdapat juga stratifikasi pembagian tugas. Dan yang bertugas untuk memberi pengamanan kepada pekerjaanya adalah *security departmen* sebagai bagian dari manajemen pengamanan yang disediakan PT BP Indonesia bagi karyawannya.

Beberapa contoh kasus yang pernah dilaporkan kepada Departemen Sekuriti BP Indonesia adalah pencurian di rumah salah satu *expatriate* yang berlokasi di Executive Paradise. Tidak hanya pencurian di rumah *expatriate*, pegawai lokal dengan inisial N pada kuartal ke tiga tahun 2009

ada yang mengalami perampokan dengan kekerasan di Taksi “S” dengan kerugian materi yang mengakibatkan korbannya mengalami trauma. Selain tindak kejahatan yang dialami di rumah dan di jalan, tidak terhitung banyaknya kejadian kriminal di kantor, mulai dari kehilangan *handphone*, *laptop*, hingga laci arsip yang berukuran besar pun pernah dilaporkan hilang.

Berdasarkan *empirical problem* di atas dapat kita lihat bahwa kejahatan menimpa pegawai dimana-mana, mulai dari di kantor saat sedang melaksanakan kewajibannya, di perjalanan, di rumah, bahkan di lokasi tempat tinggal yang dikhususkan bagi pegawai. Lemahnya pertahanan diri jangan serta merta dikaitkan dengan lemahnya seorang pegawai, perlu pertanggungjawaban dari pihak manajemen tempat pegawai tersebut bekerja. Bukan berarti pegawai kemudian semena-mena juga, namun setidaknya perusahaan dapat melakukan langkah *prevention* dengan cara memberikan penyuluhan, saran, hingga *assessment* terhadap pegawainya, sehingga selain dapat secara langsung meningkatkan mutu kehidupannya, dapat juga meningkatkan kinerja pegawai di perusahaan karena pegawai memiliki rasa aman.

### Metode Penulisan

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memperoleh informasi yang menyeluruh mengenai keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak *security department* BP Indonesia untuk mencegah pegawainya agar tidak menjadi sasaran tindak kriminal. Penulis memperhatikan mengenai keberadaan manajemen sekuriti pada PT BP Indonesia, tugas-tugas yang menjadi dasar dari kegiatan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan penulisan ini kemudian diuraikan dengan digabungkan dengan konsep-konsep pencegahan kejahatan yang sesuai untuk kemudian digunakan sebagai acuan pertanyaan sehingga kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi data yang memiliki kualitas tinggi. Selain mengarahkan teori untuk mengajukan pertanyaan, penulis juga akan menggunakan operasionalisasi konsep tersebut sebagai landasan penulis dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Karena datanya diharapkan mengedepankan alasan pembuatan kebijakan tertentu pada tingkat manajemen, maka informan sebagai pembuat dan yang memiliki kuasa untuk mengaktifkan kebijakan tersebut harus dapat mengungkapkan pendapatnya seluas-luasnya. Untuk itu penulis menggunakan teknik wawancara mendalam yaitu wawancara tak berstruktur. Wawancara dengan teknik ini memungkinkan informan yang diwawancarai untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan.

Penulisan ini menggunakan tipe penulisan deskriptif untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu atau menggambarkan berdasarkan atas kewajiban-kewajiban aktual yang ditampilkan oleh orang yang sedang diteliti, yaitu sejauh mana usaha dan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen departemen sekuriti BP Indonesia untuk mencegah pegawainya menjadi korban kejahatan, apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) dan *Quarterly Performance Review* (QPR) mereka. Selain memberikan deskripsi berdasarkan realitas kegiatan departemen sekuriti BP Indonesia, penulisan ini juga bersifat analitis dimana penulis melakukan analisa sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu strategi pencegahan kejahatannya yang sesuai dengan teori dan konsep yang telah ada sehingga diperoleh hasil penulisan yang akademis.

Penulis melakukan penelitian terhadap kebijakan yang dimiliki oleh *security department* PT BP Indonesia, untuk kemudian dibatasi hanya pada lokasi yang menurut penulis perlu mendapat perhatian untuk diketahui detail tindakan pencegahan kejahatan yang dilakukan, yaitu sesuai dengan yang terdapat pada kantor pusatnya di Perkantoran Hijau Arkadia, Jl. Letjen. TB. Simatupang Kav. 8, Jakarta 12520. Waktu yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penulisan adalah setiap saat bila terdapat aktivitas dari Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia beserta *vendornya* yang terkait dengan kebijakan mereka mencegah pegawai BP Indonesia menjadi korban.

Penulis menggunakan beberapa jenis data seperti data primer, yaitu data yang didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang kompeten sehingga data tersebut akan sesuai dengan kebutuhan penulisan ini. Wawancara terfokus dilakukan oleh penulis kepada pejabat atau institusi tertentu, yaitu Departemen Sekuriti BP Indonesia dan kepada manajer dan pegawai instansi pengamanan *outsourcing* yang digunakan jasanya oleh PT BP Indonesia. Selain melakukan wawancara, sebagai data primer dalam penulisan ini, penulis juga ikut melakukan kegiatan yang dilakukan Departemen Sekuriti PT BP Indonesia. Dengan melakukan observasi dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan pengamanan bagi pegawai-pegawainya tersebut, penulis memperoleh pengalaman dan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan yang dilakukan Departemen Sekuriti PT BP Indonesia terkait dengan cara mereka meningkatkan keamanan pekerjaanya.

Data sekunder yaitu data yang didapatkan oleh penulis berasal dari buku, koran, majalah, internet, hingga artikel tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Juga termasuk di dalamnya adalah dokumen dan data-data dari pihak departemen sekuriti BP Indonesia, serta instansi sekuriti

*outsourcing* yang digunakan, dan lain-lain. Buku besar mengenai peraturan sistem sekuriti dari Departemen Sekuriti PT BP Indonesia dimana terdapat aturan-aturan baku bagi Departemen Sekuriti dalam melakukan kegiatannya merupakan salah satu sumber data sekunder miliki penulis.

## **Temuan Data Lapangan**

### *Akses*

Perkantoran Arkadianya sendiri menyediakan penyaringan keamanan dengan menggunakan jasa parkir dengan tambahan tenaga sekuriti untuk melakukan *scanning* terhadap kendaraan yang keluar masuk. Namun Departemen Sekuriti BP Indonesia sendiri memiliki sistem penyaringan keamanan yang lebih detail. Memiliki informasi yang harus dijaga dari pihak luar yang ingin mengganggu kinerja perusahaan merupakan salah satu alasan mengapa sistem pengamanan yang dibuat begitu ketat. BP Indonesia pun melakukan penyaringan mulai dengan penyaringan pekerja, barang bawaan dan kendaraan.

#### 1. ID Card, Kebijakan dan Prosedur

Kartu Identitas adalah salah satu bagian dari sistem keamanan sehingga tidak semua orang bisa memasuki area kantor BP Indonesia. Secara sekilas kartu identitas merupakan alat seleksi antara pekerja maupun tamu dan orang yang tidak berkepentingan. Adapun kegunaan yang lebih luas lagi adalah sebagai kontrol pegawai karena setiap kartu dilengkapi dengan *chip* yang akan terekam pada sensor di *turnstile* maupun di *card reader* di setiap ruang kantor.

Yang berhak memiliki Kartu Identitas dengan *chip* aktif adalah pegawai, pengunjung dan pegawai magang/mahasiswa. Bagi pegawai baik permanen maupun non-permanen dan pegawai magang/mahasiswa diharuskan untuk mengisi *Badge Application Form* untuk kemudian dimintai persetujuan oleh kepala bagian tiap departemen yang bersangkutan lalu diserahkan kepada *Control Room Operator* (CRO) untuk dibuatkan kartunya serta diaktifkan *chip* didalamnya sesuai masa bekerja. Sebagai alat penyaring yang kasat mata, kartu pegawai dan pegawai magang/mahasiswa memiliki bentuk yang berbeda dibanding pengunjung atau tamu. Pengunjung atau tamu diwajibkan untuk selalu ditemani pendamping yang merupakan pegawai BP Indonesia. Pegawai yang merupakan tuan rumah pengunjung dapat ikut membantu mengawasi tindakan pengunjung/tamu dan membantu pengunjung/tamu bila membutuhkan bantuan.

Pekerja dan pekerja magang atau mahasiswa yang memiliki Kartu Identitas dapat memasuki gedung hingga ruang kantor di Perkantoran Arkadia. Setiap kartu memiliki *chip* dan magnet yang dapat membuka *turnstile* di lobby E dan *card reader* di setiap pintu masuk ruang kantor di

setiap lantai. Kartu Identitas setiap pekerja memiliki nomor rekamnya masing-masing, yang kemudian akan sangat berguna bila ingin dilakukan reka ulang kejadian tertentu. Beberapa lantai yang menyimpan informasi sangat penting bagi perusahaan hanya dapat diakses oleh pekerja tertentu yang memiliki wewenang.

## 2. Luggage Check dan Barang Tertinggal

Setiap pekerja maupun tamu yang memasuki dan meninggalkan lobi kantor BP dan membawa bawaan akan diperiksa oleh Petugas Keamanan dan yang bersangkutan harus mengisi Buku Pemeriksaan Barang. Jika perlu, Petugas Keamanan tersebut dapat meminta Surat Pengantar Barang (*Delivery Slip*) dari orang yang membawa barang bawaan keluar dari kantor BP. Hal ini menurut Jakarta Coordinator dimaksudkan untuk mengantisipasi ancaman dan barang apa saja yang masuk. Pemeriksaan barang dilakukan baik dengan meraba dan melihat sekilas hingga menggunakan *metal detector*. Beberapa informan mengakui akan pentingnya *security sense* dalam mengamati pengunjung. Beberapa pekerja mengaku kepada satpam yang bertugas bahwa cara ini memang merepotkan apabila sedang terburu-buru.

## 3. Vehicle Security

BP Indonesia melakukan tambahan pengamanan bagi kendaraan pekerjanya yaitu lahan parkir tersendiri dengan pelayanan tambahan dari *vendornya*. BP Indonesia memberikan *vehicle sticker* yang diberikan secara cuma-cuma kepada semua pekerjanya yang memiliki mobil sehingga dapat parkir di lokasi tersebut.

### *Expatriate Procedures*

#### 1. Kebijakan untuk Pengunjung

Indonesia sebagai Negara Tingkat II menghadirkan resiko yang lebih tinggi, terutama dari ancaman para ekstrimis. Kondisi yang sangat bervariasi memerlukan peningkatan tindakan pengamanan dan tanggungjawab serta pemantauan staf yang menyeluruh. Sewaktu mempertimbangkan aplikasinya untuk perjalanan bisnis, ketajaman naluri dalam memimpin di lapangan diperlukan untuk menilai kondisi setempat.

Sebagai Negara Tingkat II kemudian BP Indonesia hanya mengizinkan perjalanan bisnis ke Indonesia bila persyaratan tertentu telah terpenuhi, yaitu: (1) Persetujuan dari Business Unit (BU) atau Pimpinan Fungsi Terkait (FL), (2) Persetujuan dari salah satu anggota SLT Indonesia, (3) Formulir Informasi Pengunjung yang telah diisi lengkap, (4) Izin Bepergian dari BP *Security Manager*. Setelah melengkapi nomor 1 hingga 3, maka semua persetujuan dan formulir yang telah diisi lengkap diberikan kepada Business Support Coordinator Departemen Sekuriti BP Indonesia untuk

mendapatkan persetujuan akhir dari Security Manager selambat-lambatnya dua minggu sebelum perjalanan yang diusulkan.

## 2. Security Briefing

*Security Briefing* adalah kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Security untuk memberi pengetahuan mengenai keadaan keamanan di Indonesia bagi semua pekerja expatriate BP yang baru. Kegiatan ini adalah kegiatan yang wajib dilakukan tidak hanya di BP Indonesia, melainkan di semua kantor cabang British Petroleum di seluruh dunia. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan agar expatriat yang bersangkutan bisa mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah dirinya menjadi sasaran kejahatan.

Mendapatkan *Security Briefing*—Pengarahan Keamanan adalah hak bagi semua pengunjung, pekerja, dan kontraktor ekspatriat yang mengunjungi Indonesia sebagai negara Level 2. Pengarahan melalui pemutaran video ini diperuntukkan bagi pengunjung yang pertama kali datang atau enam bulan sebelumnya telah mendapat pengarahan keamanan oleh Karyawan Departemen Sekuriti yang bertugas saat itu. Untuk mendapatkan pengarahan ini, dapat diatur dengan cara ekspatriat atau tuan rumah yang mengundang ekspatriat tersebut agar menghubungi Departemen Sekuriti.

Setelah mendapatkan pengarahan, ekspatriat yang bersangkutan akan diberikan beberapa buku, selebaran, dan kartu sebagai berikut; (1) *Security Handbook*, (2) *Leafet* berisi kebutuhan sehari-hari ekspatriat saat mengunjungi Indonesia seperti nama-nama hotel yang direkomendasikan, nilai rupiah yang terbaru, dan bahasa yang sehari-hari digunakan di Indonesia, (3) *Kartu Nama* yang berisi nomor-nomor telepon karyawan Department Security yang berwenang dan nomor-nomor telepon darurat lainnya seperti pemadam kebakaran, *Search and Rescue*, dan kantor-kantor polisi.

Berdasarkan observasi di lapangan oleh penulis, sebelum melakukan *Security Briefing*, Karyawan Departemen Security yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melakukan persiapan sebagai berikut; (1) Mencari tahu ketersediaan ruangan untuk melakukan *briefing*. Ruangan atau lokasi untuk melakukan *briefing* dapat ditentukan oleh tuan rumah ekspatriat maupun disediakan oleh *Security Department*, (2) Mencari tahu sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi dimana *briefing* akan diberikan.

## 3. Expatriate Warden System

Setiap pekerja ekspatriat BP (permanen, kontrak langsung, dan kontrak pihak ketiga) akan dimasukkan ke dalam *Expatriate Warden System* yang dibagi secara geografis. Departemen Sekuriti akan memberitahu nama *warden* untuk pekerja ekspatriat BP yang baru setelah mereka mempunyai alamat tinggal tetap. Untuk mendapatkan nama *warden*, ekspatriat BP yang baru tersebut harus segera menginformasikan alamatnya kepada Business Support Coordinator Departemen Sekuriti BP Indonesia. Sehingga kemudian Departemen Sekuriti hanya sebagai pengamat dan pencatat saja tanpa ikut serta secara langsung. Setiap pekerja ekspatriat BP (permanen, kontrak langsung, dan kontrak pihak ketiga) yang beralamat di Jakarta, disediakan satu unit Telepon Satelit untuk digunakan dalam keadaan darurat.

#### 4. Sistem Informasi

Seminggu sekali setiap pekerja ekspatriat akan menerima informasi terkini di Jakarta (termasuk Papua). Hal ini akan digunakan dalam keadaan darurat dan akan dicatat secara rahasia.

#### 5. Evakuasi Darurat

Program ini diperuntukkan untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan dari seluruh pekerja ekspatriat, keluarga mereka, pengunjung dan kontraktor BP (mereka yang tidak tercakup dalam program darurat perusahaannya) di Indonesia. Ini termasuk persyaratan pemberian perlindungan yang aman di Indonesia sebelum dievakuasi ke lokasi yang aman di luar negeri. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memungkinkan perusahaan untuk bertindak dengan cara yang terencana terhadap berbagai tingkat kegelisahan dan untuk mengkomunikasikan program ini kepada staf ekspatriat, keluarga mereka, pengunjung dan kontraktor.

Tugas *warden* antara lain adalah: (1) Menentukan lokasi pekerja ekspatriat, kontraktor ekspatriat (mereka yang belum tercakup dalam program evakuasi perusahaan setempat) dan tanggungan mereka seperti keluarga maupun kerabat yang mengikuti; (2) Mengadakan komunikasi di antara *warden manager*, pekerja dan keluarga mereka; (3) Menyampaikan pesan evakuasi bertahap; (4) Menyampaikan petunjuk evakuasi. Menjadi seorang *warden* memiliki peran yang penting, karena (1) *Warden* di BP Indonesia adalah pusat dari konsep tim BP dan merupakan komponen keamanan inti. *Warden* bertanggung jawab atas komunikasi dan akuntabilitas dari staf dan keluarga mereka yang dibebankan kepada mereka selama keadaan krisis; (2) *Warden* mempunyai peran yang penting untuk memelihara kesadaran keamanan di antara staf dan pekerja BP, dan menjadi kunci atas keberhasilan dari implementasi program kontigensi BP. *Warden* merupakan bagian terpadu dari sistem komunikasi dan penanganan Tim Penanganan Kecelakaan- *Incident Management Team* (IMT); (3) Jika



keadaan kontingensi terjadi dimana IMT menganggap perlu untuk memberlakukan prosedur, maka *warden* merupakan peran kunci dalam memastikan bahwa staf dan keluarga mereka yang berada di bawah tanggungjawabnya melakukan peran mereka masing-masing secara aman dan efektif; (4) Setiap anggota staf mempunyai peran penting dalam proses pengendalian mutu dalam memastikan bahwa Sekuriti BP menyadari perubahan yang terjadi terhadap bidang pengawasan, atau dalam menyarankan perbaikan terhadap sistem; (5) Dalam masa yang normal, Pimpinan Tim *Warden* umumnya berhubungan dan bekerjasama dengan Sekuriti BP.

### *Sosialisasi Keamanan*

#### 1. Buletin Kesadaran Keamanan

Buletin yang berisikan beberapa saran keamanan dalam keadaan tertentu, pelajaran yang dipetik dari pengalaman kriminal atau keamanan termasuk pengalaman yang terjadi di antara pekerja BP Indonesia, serta saran keamanan penting lainnya. Buletin ini dibagikan oleh Departemen Sekuriti setiap bulan kepada seluruh pekerja BP Indonesia melalui email atau koran elektronik "Security Awareness".

#### 2. Informasi Keamanan

Departemen Sekuriti memberikan informasi keamanan yang penting melalui email kepada seluruh pekerja BP Indonesia setiap hari yang terdiri dari (1) *Security Advisory Bulletin*: Berisi beberapa rencana demonstrasi termasuk daerah demonstrasi yang akan berlangsung setiap hari dan (2) *Daily Risk Assessment (DRA)*: berisikan rangkuman berita penting yang terjadi di Indonesia termasuk beberapa berita keamanan. DRA bertujuan agar semua pekerja BP Indonesia menerima informasi mengenai apa yang terjadi di sekitar Indonesia khususnya berita-berita penting media. Informasi ini didapatkan melalui salah satu *outsourc*e Departemen Sekuriti yang dalam penulisan ini dilarang untuk disebutkan. Dengan memberikan informasi keamanan langsung kepada setiap pekerja BP Indonesia diharapkan resiko yang menyebabkan pekerja menjadi korban dapat dikurangi.

#### 3. SMS Jaringan Keamanan

Selain memberikan informasi keamanan yang dikirim melalui *email*, Departemen Sekuriti ingin memastikan informasi penting cepat dan benar didapatkan oleh pekerja BP Indonesia melalui layanan *Short Message Service (SMS)*. Layanan SMS jaringan keamanan adalah layanan pesan pendek yang dikirimkan ke semua *handphone* pekerja BP Indonesia. Pesan pendek tersebut biasanya berisi informasi penting seperti demonstrasi

dengan skala besar, gempa bumi, banjir, ledakan bom serta informasi penting lainnya.

### *Risks Assessment*

#### 1. Hotel dan Apartemen

Dalam melakukan kegiatannya, BP Indonesia seringkali menggunakan tempat lain diluar kantor sebagai *meeting point* dengan pihak-pihak luar. Sebelum menyetujui tempat tertentu untuk dijadikan tempat pertemuan, terlebih dahulu pekerja sebagai *user* atau pengguna jasa meminta Departemen Sekuriti BP Indonesia untuk melakukan *risk assessment*.

#### 2. Housing Expatriate

Melakukan *Risk Assessment Housing Expatriate* berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari ekspatriat yang bersangkutan. Berdasarkan hasil *assessment* oleh ABB dan pegawai Departemen Sekuriti BP Indonesia, maka kemudian akan ditentukan apakah lokasi tersebut sesuai atau tidak untuk dijadikan *meeting point*. Kriteria penilaiannya sangat abstrak dan sangat tergantung dengan kondisi sewaktu di lokasi *assessment* pada waktu tersebut, tidak di masa yang akan datang maupun masa yang lalu.

### *Housing Patrol*

*Expatriate Housing Patrol* adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh anggota sekuriti untuk perumahan ekspatriat yang rumahnya sebelumnya telah dilakukan *risk assessment*. Kegiatan ini tentunya dimaksudkan sebagai kontrol atas sistem keamanan yang sebelumnya telah ada pada rumah yang telah di *assess* sebelumnya sehingga resiko yang mungkin dihadapi pemilik rumah pun bisa dikendalikan. Patroli dilakukan sehari dua kali yaitu siang dan malam.

### *Bomb Threat Procedures*

Sebagai negara dengan tingkat kewaspadaan keamanan level 2 dengan banyaknya konflik, kemungkinan untuk mendapatkan komunikasi mengenai ancaman bom tidak dapat dihilangkan dari setiap individu. Departemen Sekuriti BP Indonesia menerbitkan langkah-langkah praktis yang sebaiknya diikuti oleh pegawai yang menerima telepon ancaman akan adanya bom. Adapun peraturan ini khusus terkait ancaman dalam wujud komunikasi telepon. Komunikasi lain berupa surat maupun yang memiliki wujud fisik akan diserahkan segera pada pihak yang berwajib. Prosedur ini mengharuskan penerima telepon untuk tenang terlebih dahulu, berusaha mendengarkan dengan baik latar belakang demografis penelepon seperti jenis kelamin, budaya hingga kemungkinan lokasi penelepon dari suara di belakang si penelepon. Pegawai yang menerima telepon diharapkan untuk

mengetahui keinginan penelepon. Dengan menggunakan catatan sebisanya mungkin penerima telepon mencatat kata-kata penelepon persis kata perkataanya apalagi bila tidak memiliki alat perekam. Detil percakapan seperti tanggal dan waktu telepon juga sebaiknya dicatat.

## Analisis

### *Konsep Pencegahan Kejahatan dalam Manajemen Sekuriti BP Indonesia*

Pencegahan kejahatan adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, memindahkan, hingga menghilangkan kejahatan. Bila dirunut sesuai dengan teknik yang dikembangkan oleh Lejins dalam menjelaskan cara pencegahan kejahatan maka bentuknya akan sebagai berikut:

(1) *Prevention*; Sebagai tindakan pencegahan, maka Manajemen Sekuriti PT BP Indonesia menerapkan beberapa langkah pencegahan kejahatan agar pegawainya tidak menjadi korban kejahatan, yang termasuk sebagai langkah *prevention* yaitu: Kepemilikan *ID Card*, *Luggage Check*, *Vehicle Security*, dan semua kebijakan yang termasuk dalam *Expatriate Procedures*.

(2) *Elimination of Crimogenic Social Condition*; Kebijakan yang menyebabkan penghapusan kondisi sosial yang kriminal dilakukan oleh Manajemen Sekuriti BP Indonesia, yaitu yang terdapat dalam Prosedur Kepemilikan *ID Card* karena dengan terawasinya pergerakan pegawai, diharapkan bila ada calon pelaku kejahatan dapat segera diketahui siapa saja yang telah mengakses daerah tersebut untuk kemudian dilakukan penyaringan.

(3) *Mechanical Prevention, or Measures to Reduce Criminal Opportunities*; Mekanisme dan alat ukur untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminal. Adapun alat-alat dan teknologi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan terdapat hampir di semua kebijakan, yaitu *ID Card*, *Luggage Check*, Sistem Informasi bagi Ekspatriat, sosialisasi keamanan, *Risks Assesment*, dan *House Patrol*. Terdapat pula mekanisme sederhana pada ketiga bentuk sosialisasi, yaitu pada buletin, kebijakan sosialisasi keamanan, SMS jaringan keamanan, *risks assesment*, dan *house patrol*.

**Tabel 2. Gambaran Analisa Pencegahan Kejahatan pada Kebijakan Pencegahan Kejahatan terhadap Pegawai Departemen Sekuriti BP Indonesia**

| Crime Prevention                                                   | Unsur Analisa                          | Analisa                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Prevention</i>                                                  | Akses                                  | <i>Id Card</i> : Menyaring Orang/Pegawai                                                         |
|                                                                    |                                        | <i>Luggage Check</i> : Menyaring Barang                                                          |
|                                                                    |                                        | <i>Vehicle Security</i> : Menyaring Kendaraan                                                    |
|                                                                    | <i>Expatriate Procedures</i>           | <i>prevent from unwanted factors; prevent from being victimized</i> ; Antisipasi bahaya          |
|                                                                    | <i>Housing Patrol</i>                  | Pengawasan                                                                                       |
| <i>Elimination of Criminogenic Social Condition</i>                | <i>Id Card</i>                         | Penyaringan dengan Alat Saling mengenal → <i>natural surveillance</i>                            |
| <i>Mechanical Prev. or Measures to Reduce Criminal Opportunity</i> | <i>Akses</i>                           | <i>ID Card, turnstile, dan card reader(id card); Garret &amp; Barcode Reader (luggage check)</i> |
|                                                                    | <i>Expatriate Informational System</i> | Alat khusus untuk komunikasi darurat                                                             |
|                                                                    | Sosialisasi Keamanan                   | Mekanisme dan Media sebagai Alat Komunikasi Dua Arah                                             |
|                                                                    | <i>Risks Assessment</i>                | Mekanisme, Peralatan dan Perlengkapan                                                            |

*Manajemen Pencegahan Kejahatan dalam Manajemen Sekuriti BP Indonesia*

James Stoner sebagai pakar manajemen menjelaskan pentingnya peran manajemen dalam suatu perusahaan untuk menjaga kelangsungan proses produksi dalam suatu perusahaan. Untuk itulah perusahaan harus juga menetapkan suatu tujuan yang jelas, begitu pula dengan manajemen-manajemen dibawahnya. Departemen Sekuriti BP Indonesia mendedikasikan dirinya tidak hanya untuk menjaga proses produksi, namun juga menjaga keamanan pegawainya sebagai aset yang menggerakkan proses produksinya. Data yang dimiliki oleh penulis memperlihatkan bahwa Departemen Sekuriti BP Indonesia memiliki fungsi manajemen dasar

seperti yang dinyatakan oleh Stoner dan Robbins yang tentu saja berhubungan dengan keamanan pegawai sebagai aset perusahaan, yaitu:

1. *Planning*; Sebelum melakukan perencanaan, maka perlu ditetapkan tujuan dari dibentuknya manajemen tersebut, dalam hal ini Departemen Sekuriti BP Indonesia memiliki tujuan berdasarkan visi dan misinya, yaitu meningkatkan secara signifikan reputasi BP Indonesia dan memajukan tujuan usaha inti perusahaan melalui pelayanan berkualitas tinggi dan keunggulan mutu personilnya dengan cara menyediakan lingkungan kerja yang aman dengan cara melindungi pekerja, kerugian atau kerusakan akibat tindakan yang bersifat kriminal, bermusuhan dan balas-dendam.
2. *Organizing*; Manajemen seperti yang dinyatakan oleh Sennewald aturan-aturan yang dibuat kemudian membuat manajemen harus menetapkan adanya perencanaan-perencanaan yang tercermin dalam pembagian kerja yang terkoordinir. Pembagian kerja ini termasuk di dalam manajemen maupun di luar manajemen.
3. *Leading*; Peran manajemen menurut Stoner dan Robbins sesuai dengan manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia dalam hal keamanan pegawainya terlihat dari wewenangnya untuk mengambil keputusan, menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh yang membutuhkan sesuai dengan wewenangnya. Peran sebagai pengambilan keputusan terlihat seperti yang dilakukan oleh Business Support Coordinator dalam melakukan pengaturan dan pengoperasionalisasian secara langsung kepada *warden system* yang sedang berlangsung, menciptakan video *security briefing*, serta memimpin pemeriksaan *quarterly performance review* dengan pihak lain. Peran pengambilan keputusan juga terlihat pada SLA Jakarta Coordinator dalam hal pembuatan *security assessment* bagi perkantoran arkadia dan tempat tinggal ekspatriat serta *meeting point* dan apartemen. Peran interpersonal juga terdapat dalam SLA Business Support Coordinator dan Jakarta Coordinator, yaitu dalam hal berhadapan dengan pegawai, *vendor*, dan ekspatriat. Mereka harus melayani pegawai termasuk pegawai ekspatriat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja *vendor* dalam hal kontrak sehingga tercapai tujuan dari kerja sama mereka. Peran Business Support Coordinator dan Jakarta Coordinator dalam memberikan informasi terlihat dari wewenang mereka memberikan *security briefing*, melakukan distribusi informasi baik melalui buletin maupun sms kepada semua pegawai, serta dukungan-dukungan lain kepada tugas *vendor*.

4. *Controlling*; Peran untuk melakukan pengawasan terhadap proses yang sedang berjalan juga dilakukan oleh Business Support Coordinator dan Jakarta Coordinator untuk meningkatkan kinerja keamanan bagi pegawainya. Hal ini terlihat dari pengamatan yang mereka lakukan terhadap *vendor* saat mereka melakukan pelatihan, karena hal ini merupakan salah satu QPR *vendor*. Mereka juga melakukan evaluasi dan operasionalisasi dari prosedur standar yang telah dijalankan. Dari evaluasi dan *assessment* yang mereka lakukan kemudian mereka akan melakukan pertimbangan apakah perlu dilakukan pembaharuan atau kinerja yang ada tetap dilanjutkan.

Sennewald kemudian menjabarkan kinerja-kinerja manajemen dengan lebih detail terutama manajemen dalam organisasi sekuriti. Dari sembilan tugas yang dilakukan organisasi sekuriti, dalam Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia terdapat sembilan tugas pula yang dilakukan sehubungan dengan pengamanan pegawai BP Indonesia, yaitu:

1. Berbicara dengan pekerja; dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Sennewald adalah melakukan komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal, baik secara tertulis maupun lisan hingga menjadi pendengar. Secara horizontal, Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia diharapkan dapat melakukan komunikasi kepada pegawai yang satu level dengannya. Secara vertikal, Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia diharapkan dapat melakukan komunikasi kepada atasan maupun pihak lain di luar pegawai;
2. Memberi petunjuk pada pekerja tingkat di bawahnya; yang dimaksudkan oleh Sennewald disini tidak hanya berarti bawahannya, namun juga pihak lain selain pegawai BP Indonesia dalam hal ini adalah *vendor* Departemen Sekuriti BP Indonesia;
3. Membuat surat; Pertama-tama terlihat dari konsistensi mereka yang menerbitkan *Security Handbook* yang secara umum dapat membantu semua pihak memahami tujuan Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia, pada pembaharuan buletin juga terlihat dalam tugas Business Support Coordinator yang berhubungan dengan peningkatan keamanan pegawai bahwa ia harus melakukan pembaharuan, pada SLA Jakarta Coordinator juga terlihat adanya pembuatan surat yaitu dalam hal pembuatan penilaian berdasarkan hasil *risks assessment* di hotel, apartemen, dan perumahan ekspatriat;
4. Menerbitkan tujuan pencegahan kerugian; hal ini sesuai dengan pernyataan Stoner dimana sebuah organisasi harus memiliki tujuan. Pernyataan Stoner ini kemudian kita gabungkan dengan pemikiran Sennewald akan organisasi sekuriti, maka yang kita dapatkan adalah

tujuan pencegahan kejahatan yang kemudian harus direalisasikan dengan cara dipublikasikan;

5. Merencanakan program pencegahan kerugian; program pencegahan kerugian ini menurut Sennewald adalah tindakan-tindakan seperti inspeksi, *assessment*, survey, dan *risks assessment*. Tindakan tersebut pada kenyataannya memang terlihat pada tugas yang diemban oleh Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia seputar keamanan pegawainya. Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia melakukan pengawasan terhadap kontrak *vendor*, membuat penilaian keamanan (*security assessment*) untuk perkantoran Arkadia dan tempat tinggal ekspatriat, dan penilaian terhadap hotel dan rumah ekspatriat yang berhubungan dengan masalah sekuriti;
6. Menyewa petugas keamanan yang baru; tidak semua *vendor* dan personil keamanan dapat selalu berjalan mulus, Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia memiliki kebijakan untuk meminta pertanggungjawaban *vendor* dengan cara melakukan pemeriksaan perempatan tahun atau *quarterly performance review* (QPR). Saat QPR sudah tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia, maka pihak manajemen berhak memutuskan hubungan kerja sesuai ketentuan dan melakukan *open tender* kepada semua pihak yang bersedia memenuhi kebutuhan Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia;
7. Membaca surat dan laporan; Mirip dengan pembuatan surat, namun dalam hal ini Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia hanya melakukan pembacaan pada surat dan laporan yang dibuat oleh *vendor* dan masukan-masukan dari pegawai BP Indonesia. Laporan yang dibuat oleh *vendor* kepada pihak Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia, baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, hingga tahunan kemudian dapat menjadi cara perhitungan tersendiri untuk menilai kinerja *vendor*. Adapun surat dan laporan yang dibuat oleh pegawai BP Indonesia yang ditujukan kepada Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia kemudian akan menjadi *lesson learn* bagi Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya sesuai harapan pegawai BP Indonesia sebagai *user*;
8. Menghadiri pertemuan; tentu saja yang dimaksudkan oleh Sennewald disini sederhana saja, yaitu menghadiri rapat yang berhubungan dengan keamanan. Aplikasinya dalam kebijakan Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia terlihat dengan diadakannya rapat-rapat terutama rapat QPR untuk membahas kinerja *vendor*. Business Support Specialist juga melakukan pertemuan dengan ekspatriat saat *expatriate warden system* sedang berlangsung. Jakarta Coordinator juga

menghadiri pertemuan saat *vendor* melaksanakan pelatihan pengamanan. Kehadiran pejabat Departemen Sekuriti ini dalam pertemuan semata-mata untuk melihat kinerja yang ada;

9. Membuat keputusan mengenai alat keamanan yang baru; pernyataan Sennewald ini jelas terlihat bahwa yang perlu ditingkatkan tidak hanya hubungan interpersonal dan sosial saja, namun juga peningkatan bentuk fisik. Seperti pernyataan informan juga bahwa alat yang digunakan akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan jaman.

**Tabel 3. Gambaran Analisa Manajemen terhadap Fungsi dan Tugas Manajemen pada Departemen Sekuriti BP Indonesia**

| Teori            | Analisa Teori                                                                    |                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fungsi Manajemen | Planning                                                                         | Dept. Sekuriti menetapkan rencana untuk mencapai tujuan |
|                  | Organizing                                                                       | Pembagian kerja internal & eksternal                    |
|                  | Leading                                                                          | Stratifikasi kedudukan & wewenang                       |
|                  | Controlling                                                                      | QPR; evaluasi operasional <i>standard procedure</i>     |
| Tugas Manajemen  | Melakukan komunikasi dengan sesama pegawai dept. & pegawai lainnya               |                                                         |
|                  | Memberi petunjuk pada <i>vendor</i> dan TPC lainnya                              |                                                         |
|                  | Membuat surat hasil <i>assessment</i> dan publikasi informasi keamanan           |                                                         |
|                  | Menetapkan tujuan berupa Visi dan Misi                                           |                                                         |
|                  | Merencanakan program pencegahan kerugian pada vendor dan hasil <i>assessment</i> |                                                         |
|                  | Menyewa petugas keamanan yang baru bila sudah tidak sesuai QPR                   |                                                         |
|                  | Membaca surat & laporan dari pegawai BP dan <i>vendor</i>                        |                                                         |
|                  | Menghadiri pertemuan rapat dan pelatihan pengamanan <i>vendor</i>                |                                                         |
|                  | Membuat keputusan terhadap kelayakan semua alat keamanan                         |                                                         |

### *Target dan Proses Pencegahan Kejahatan*

Kini sampailah penulis pada analisa mengenai model pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia. Model pencegahan kejahatan yang menurut penulis sesuai untuk menganalisa kebijakan pencegahan kejahatan bagi pegawai yang digunakan oleh BP Indonesia adalah *situational crime prevention* dan *social crime prevention*.

Untuk mempermudah analisa, penulis menggunakan proses/target dua dimensi tipologi pencegahan kejahatan yang ditawarkan Adam Crawford dan Van Dijk (1991). Analisa dari kedua tipologi tersebut digabungkan dengan pemikiran kriminologi lainnya seperti Tim Hope dan Ronald V.



Clarke. Pembagian pembahasan kedua tipologi tersebut dimaksudkan agar tidak tercampur dengan analisis penulis.

1. Situational Crime Prevention dalam Manajemen Sekuriti BP Indonesia

Dari tiga pembagian target yang ditetapkan oleh Crawford untuk *situational crime prevention*, penulis menyadari bahwa Departemen Sekuriti BP Indonesia hanya melakukan pencegahan kejahatan pada level *primary* dan *secondary*. Sekalipun diakui bahwa pencegahan kejahatan situasional menggunakan metode yang mengedepankan intervensi fisik, namun Ekblom menjelaskan bahwa tetap terdapat proses sosial, hal inilah yang akan terlihat dalam pembahasan penulis.

Menganalisa data menggunakan bagan pencegahan kejahatan situasional *primary* dan *secondary*, penulis kemudian membaginya menjadi delapan pembahasan singkat:

- a. *Target Hardening*, Clarke menganggap cara yang paling efektif untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dengan menggunakan pembatas fisik seperti kunci, monitor, dan alat-alat lain yang berhubungan. Bila diaplikasikan kepada metode yang digunakan oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia, maka dapat kita lihat pada prosedur dan penggunaan *ID Card* dimana pegawai yang bersangkutan harus melakukan *scan* kepada *turnstile* agar dapat memperoleh akses masuk ke dalam ruangan di gedung Perkantoran Arkadia yang sesuai. Dengan melakukan kebijakan ini, terbukti hingga saat ini tidak ada orang-orang yang tidak berkepentingan yang dapat memasuki wilayah kantor BP Indonesia;
- b. *Surveillance*, pengawasan menurut Clarke dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu teknologi elektronik dan pegawai tertentu. Kebijakan Departemen Sekuriti membuktikan adanya kedua metode ini; pengawasan dengan teknologi elektronik terdapat pada penggunaan CCTV yang lokasinya tidak boleh dipublikasikan oleh penulis dan penggunaan *data base* untuk mengawasi mobilitas pegawai BP Indonesia. Seperti yang dinyatakan oleh Straub dan Welke, pengawasan semacam ini mungkin tidak secara signifikan menunjukkan efek penurunan kejahatan kekerasan, namun seharusnya dapat meningkatkan keinginan pelaku kejahatan dalam jenis kejahatan yang berhubungan dengan kendaraan. Namun sayangnya sekalipun kecelakaan, pada parkir khusus pegawai BP Indonesia terdapat keluhan mengenai kendaraan yang lecet yang tidak dapat terdeteksi pelakunya karena kealpaan pengawasan pada lokasi;

- c. *Opportunity Reduction/Removal*, yaitu inti dari teori ini, yang menginginkan pengurangan hingga penghilangan kesempatan bagi calon pelaku kejahatan untuk melakukan niat jahatnya. Bila diaplikasikan pada kebijakan yang dimiliki oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia, maka akan terlihat dari kebijakan untuk melakukan *luggage check*, *vehicle security*, *risks assessment*, dan *housing patrol*.

Pada *luggage check* jelas terlihat pengurangan dan penghilangan kesempatan bagi calon pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan karena pada setiap barang yang masuk akan dilakukan pengecekan sehingga benda-benda yang mencurigakan dapat diketahui dan yang berniat melakukan kejahatan seperti mengambil aset perusahaan pun akan mengurungkan niatnya. Pada kebijakan *vehicle security*, Departemen Sekuriti BP Indonesia mewujudkan teori ini dengan cara melakukan penyaringan bagi kendaraan yang masuk ke dalam lokasi parkir sehingga tidak sembarangan orang bisa menggunakan dan kendaraan akan senantiasa dalam pengawasan ABB.

*Risks assessment* dan *housing patrol* secara nyata dapat mengurangi kesempatan hingga menghilangkan resiko terjadinya kejahatan bagi pegawai BP Indonesia. Pada keduanya Pejabat dari Departemen Sekuriti BP Indonesia dapat memberi saran bahkan perintah langsung untuk meningkatkan keamanan lokasi yang di *assess* dan di patroli baik dalam laporannya kepada yang berkepentingan maupun kepada penanggung jawab yang berada di lokasi. Pada *risks assessment*, pejabat Departemen Sekuriti BP Indonesia bahkan dapat memberi saran agar lokasi tidak digunakan sehingga resiko yang seharusnya diderita tidak jadi diderita oleh pegawai.

- d. *Environmental Design*, yaitu intervensi pada desain lingkungan seperti yang ditawarkan Newman adanya empat faktor dasar untuk menciptakan pencegahan kejahatan dan daerah pertahanan, *territoriality*, *surveillance*, *image*, *safe area and street*. Aplikasinya pada kebijakan yang digunakan oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia terlihat pada kebijakan yang berkaitan dengan akses masuk area perkantoran BP Indonesia serta *housing patrol*. Pada ketiga kebijakan akses terlihat bagaimana ketatnya lokasi akses masuk ke perkantoran BP Indonesia yang selain tidak memungkinkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk, namun juga dapat mengurungkan niat jahat bagi calon pelaku kejahatan mengetahui ketatnya pengawasan oleh *vendor* Departemen Sekuriti BP Indonesia. Kebijakan *Housing Patrol* yang

dilakukan oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia seperti yang kita ketahui dilakukan pada waktu-waktu acak sehingga siapapun yang berniat jahat akan memperoleh pengetahuan bahwa tempat tinggal tersebut diawasi dan bila mereka berniat melakukan kejahatan maka akan mengalami kebingungan akan kemungkinan tertangkap oleh *vendor* Departemen Sekuriti BP Indonesia yang sedang berpatroli ke tempat tinggal ekspatriat.

- e. *General Deterrence*, yaitu penempatan pencegahan umum dalam rangka memperkokoh sasaran kejahatan yang menurut penulis sesuai dengan *rational choice theory* dengan cara memberikan pilihan rasional bagi calon pelaku kejahatan, apakah siap menanggung resiko untuk mengintervensi barikade keamanan yang telah dibuat. Banyaknya metode yang digunakan oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia hampir tidak memungkinkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan kepada pegawai di lingkungan perkantoran, *meeting point* yang telah disepakati, dan tempat tinggal ekspatriat karena telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan saat melakukan *risks assessment*. Pada lingkungan perkantoran, dengan adanya penyaringan pegawai, barang-barang, dan kendaraan yang masuk, maka calon pelaku pun tidak mungkin melakukan kejahatan tanpa mendapat malu bagi dirinya sendiri karena selain terlihat pada kamera CCTV, pelaku yang memiliki akses pun akan terekam sehingga dapat segera diketahui pelakunya.
- f. Pada level selanjutnya bila pencegahan kejahatan yang penting dirasa kurang, maka Crawford menawarkan target kedua yaitu dengan melakukan *design measures for 'at risk' groups* dimana kelompok yang terlihat memiliki resiko menjadi korban kejahatan yang lebih tinggi yaitu mereka yang marginal dan minoritas di suatu wilayah. Bila diaplikasikan dengan kebijakan Departemen Sekuriti BP Indonesia, maka terlihat bahwa menurut mereka yang termarginalkan adalah kelompok minoritas pekerja ekspatriat. Untuk itu penulis memasukkan kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam *expatriate procedures*, *housing expatriate*, dan *housing patrol* sebagai wujud perhatian khusus dari Departemen Sekuriti BP Indonesia untuk mencegah pegawai asing mereka menjadi korban kejahatan yang secara tidak langsung ikut mendukung reputasi mereka di mata internasional. Kebijakan-kebijakan termasuk cara pengukurannya diambil berdasarkan logika pembuatan kebijakan semata tanpa tolak ukur yang jelas, sehingga seringkali petugas

yang melakukan *assessment* dan patroli mengambil tindakan yang di luar ketentuan yang menurut penulis sangat baik karena dapat meningkatkan keamanan.

- g. cara selanjutnya untuk mencegah kejahatan bila cara-cara yang mendasar kurang efektif adalah dengan melakukan *risk prediction and assessment*, cara ini bila diaplikasikan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia terlihat dari kebijakan mereka untuk melakukan *risks assessment* terhadap hotel, apartemen, *meeting point* lainnya, dan calon tempat tinggal ekspatriat.

Setelah melakukan *assessment* terhadap lokasi-lokasi tersebut, petugas dapat segera membuat laporan mengenai kemungkinan-kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang membahayakan keselamatan pegawai yang akan menempati lokasi tersebut kepada Jakarta Coordinator (lihat Bagan 5).

## 2. Social Crime Prevention dalam Manajemen Sekuriti BP Indonesia

Selain melakukan analisa dengan menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional, penulis juga menyadari bahwa tidak semua kebijakan yang dilakukan oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia dapat dijelaskan. Penulis menyadari adanya intervensi dari Departemen Sekuriti BP Indonesia kepada pegawai dan bukannya kepada lingkungan fisik saja.

Berdasarkan tabel target tipologi pencegahan kejahatan sosial yang dibuat oleh Crawford, penulis menyadari bahwa kebijakan Departemen Sekuriti BP Indonesia hanya melakukan tindakan yang termasuk *primary*. Tindakan-tindakan tersebut adalah;

- 1) *Education and Socialisation*, penyampaian informasi secara mendetail kepada masyarakat dari pihak yang berwenang agar mereka menyadari pentingnya menciptakan rasa aman baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi lingkungannya. Sosialisasi dan pembelajaran oleh pihak yang lebih berkuasa pada kebijakan Departemen Sekuriti BP Indonesia yang mengharuskan pegawai ekspatriatnya untuk mengikuti *security briefing*. Pada prosedur ini terlihat bagaimana ekspatriat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda berusaha untuk memahami budaya Indonesia sebagai tempat tinggal baru mereka.
- 2) *Public Awareness and Advertising Campaigns*, promosi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Hal ini terlihat pada kebijakan Departemen Sekuriti BP Indonesia untuk melakukan sosialisasi

keamanan. Buletin secara *online* menampilkan kondisi umum di Indonesia terutama di Jakarta dan Papua sebagai langkah sosialisasi kampanye pencegahan kejahatan bagi sebagian besar pegawai BP Indonesia karena berisi informasi-informasi umum seperti saran pemilihan angkutan umum dan lokasi untuk melakukan kegiatan sosial. Informasi keamanan melalui koran elektronik dan email sebagai pencegahan kejahatan bagi pegawai agar tidak terkena bencana menurut penulis juga adalah langkah sosialisasi *public awareness*. Sms jaringan keamanan sebagai pesan singkat yang efektif juga telah memperlihatkan keefisiensannya saat terdapat kasus bom Marriot 17 Juli 2009 tahun lalu. Berkat sms jaringan keamanan ini pegawai-pegawai pun dapat segera melakukan monitor kepada rekan-rekan kerja dan keluarga mereka sehingga yang terkena dari dampak bom tersebut dapat segera terselamatkan karena langkah evakuasi yang efektif dari *vendor* Departemen Sekuriti BP Indonesia.

- 3) *Neighborhood Watch* Tipologi ini didukung oleh *control theory* (Hirschi) yang terlihat dalam kebijakan sosialisasi keamanan terutama pada bagian buletin dimana setiap pegawai BP Indonesia diharapkan dapat ikut serta melakukan pengawasan atas lingkungan yang mereka lewati. Teknik ini terbukti efektif karena Departemen Sekuriti BP Indonesia beberapa kali menerima masukan mengenai kinerja mereka dan *vendornya* yang dirasa kurang oleh pegawai BP Indonesia. Kritik dan masukan yang menjadi pembelajaran bagi Departemen Sekuriti BP Indonesia akan menjadi *lesson learn*. BP Indonesia kemudian akan menerbitkan email yang isinya adalah pembelajaran agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

### Kesimpulan

Selain melakukan proses produksi sesuai tujuan perusahaan, BP Indonesia harus menjaga nama baik mereka di depan *stakeholder* bahwa utusan dan pegawai mereka di Indonesia memberi respon yang baik atas keberadaan perusahaan mereka di Indonesia. Untuk itu BP Indonesia menyadari perlunya departemen yang menangani keperluan pegawai-pegawainya mengenai rasa aman sehingga pegawai sebagai penggerak proses produksi dan aset perusahaan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.

Departemen Sekuriti BP Indonesia kemudian menjawab kebutuhan perusahaan sehingga aset dan proses produksi berjalan dengan lancar tanpa gangguan keamanan. Salah satu tujuan Departemen Sekuriti BP Indonesia adalah untuk menyediakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pencegahan kejahatan bagi pegawainya. Seperti yang penulis analisa,

Departemen Sekuriti BP Indonesia telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah pegawainya menjadi korban kejahatan. Adapun langkah-langkah pencegahan kejahatan yang telah dilakukan oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia untuk mencegah pegawainya menjadi korban kejahatan seperti yang ditawarkan Lejins adalah *prevention, elimination of crimogenic social condition, mechanical prevention* atau *measures to reduce criminal opportunities*.

Penulis menyadari adanya dua tipologi yang bisa digunakan untuk menganalisa kebijakan pencegahan kejahatan yang diambil oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia, maka dengan bantuan bagan yang dibuat oleh Crawford, penulis pun menyadari bahwa tidak semua target dari kedua tipologi pencegahan kejahatan dilakukan oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia. Pada pencegahan kejahatan situasional penulis menyadari bahwa pencegahan kejahatan primer masih kurang karena desain fisik yang diintervensi masih terlalu umum. Kesadaran dari Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia untuk membuat kebijakan tambahan kepada kelompok dengan resiko yang lebih besar menurut penulis sangat tepat. Tidak hanya itu, kebijakan yang berhubungan dengan prediksi dan penilaian resiko menurut penulis juga sangat sesuai karena kesadaran bahwa pegawai tidak hanya melakukan aktivitas di lingkungan perkantoran saja, namun juga di *meeting point* di luar kantor bahkan di lingkungan perumahan tempat tinggal mereka. Pencegahan kejahatan sosial yang mengutamakan intervensi berbasis komunikasi juga sangat terlihat dan telah membuktikan efektivitasnya, karena hingga saat penulis melakukan wawancara terakhir terbukti tidak ada pegawai yang menjadi korban tindak kejahatan selama tahun 2010. Selain itu penulis juga melihat tidak adanya tindakan Manajemen Departemen Sekuriti BP Indonesia untuk menetapkan kebijakan menuju target yang kedua karena pada target pertama telah tercapai tujuan dari Departemen Sekuriti BP Indonesia untuk menghindarkan pegawainya dari tindak kejahatan.

## **Rekomendasi**

Penulis ingin memberikan rekomendasi bagi kebijakan Departemen Sekuriti BP Indonesia dalam hal penerapan penggunaan CCTV di sekitar wilayah parkir khusus pegawai BP Indonesia. Dengan melakukan peningkatan pengawasan di area parkir khusus pegawai BP Indonesia, maka penulis yakin pegawai BP Indonesia yang menggunakan wilayah parkir tersebut pun akan semakin mempercayakan alat transportasi mereka dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja kerja mereka karena rasa aman bahwa kendaraan mereka terawasi dengan baik.

Rekomendasi dari penulis selanjutnya adalah adanya kebijakan-kebijakan Departemen Sekuriti BP Indonesia yang dikhususkan bagi pegawai ekspatriat saja. Pegawai lokal pun sebenarnya ingin diperlakukan sama. Mungkin dengan pertimbangan biaya Departemen Sekuriti BP Indonesia tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang mereka berlakukan kepada pegawai ekspatriat. Untuk itu penulis ingin memberi rekomendasi sebatas bentuk sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi tambahan yaitu dalam bentuk *security briefing* bagi pegawai lokal juga. Karena pada kenyataannya, pegawai lokal lah yang menjadi korban perampokan di taksi pada tahun 2009.

Membandingkan kebijakan-kebijakan yang tertulis oleh Departemen Sekuriti BP Indonesia dengan penulisan-penulisan sebelumnya dan pengalaman penulis sendiri saat melakukan magang, penulis memperhatikan bahwa Departemen Sekuriti BP Indonesia sesungguhnya tidak memiliki buku besar yang jelas dan tertulis mengenai kebijakan mereka termasuk kebijakan untuk mencegah pegawainya menjadi korban kejahatan. Untuk itu penulis ingin memberi rekomendasi agar Departemen Sekuriti BP Indonesia membuat buku besar kebijakan mereka agar bila di masa yang akan datang terdapat pemindahan wewenang, pegawai yang baru tidak akan mengalami kebingungan.

Gabungan kebijakan dari manajemen untuk mencegah pegawainya menjadi korban kejahatan dengan intervensi sosial maupun fisik akan menghasilkan pencegahan kejahatan terhadap pegawai secara menyeluruh. Dengan terjaminnya keamanan pegawai, tercapai kenyamanan kerja, dan proses produksi perusahaan pun dapat berjalan dengan lancar

### Daftar Pustaka

- Clarke, Ronald V. (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*, 2<sup>nd</sup> ed. New York: Harrow and Heston.
- Crawford, Adam. (1998). *Crime Prevention & Community Safety: Politics, Policies & Practices*. London & New York: Addison Wesley Longman Limited.
- Elkblom, P., Sutton M., dan Law H. (1997). *Safer Cities and Residential Burglary: A Summary of Evaluation Results*. London: Home Office.
- Felson, Marcus, Ronald V. Clarke. (1998). *Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention*. London: Research Development Statistics.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Mustofa, Muhammad. (2007). ***Kriminologi: Kajian Sosiologi tentang Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum***. Kampus FISIP UI: FISIP UI Press.
- Muljadi. (2001). ***Sistem Pencegahan Kejahatan Bagi Tamu Hotel (Studi Kasus terhadap sistem keamanan Hotel "X")***. Depok: FISIP UI.
- Mulyana, Deddy. (2004). ***Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya***. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Newman, Oscar. (1996). ***Creating Defensible Space***. U.S. Dept. of Housing and Urban Devp. Office of Policy Dept. and Research.
- Riansyah, Dewi Ranny. (2006). ***Strategi Pencegahan Kejahatan di Apartemen (Studi Kasus Terhadap Apartemen "DR")***. Depok: FISIP UI.
- Robbins, Stephen P., Mary Coulter. (2007). ***Manajemen***, edisi ke-8 Jilid 1. Jakarta: PT Indeks.
- Sennewald, Charles A. (1998). ***Effective Security Management***. 3<sup>rd</sup> ed., Woburn: Butterworth-Heinemann.
- Shaw, Clifford R., Henry D. McKay. (1969). ***Juvenile Delinquency and Urban Areas***. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Syeirazi, M Kholid. (2009). ***Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia***. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Stoner, James A.F. (1993) ***Management***, 2<sup>nd</sup> ed. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Subyantoro, Arief, FX. Suwanto. (2007). ***Metode & Teknik Penelitian Sosial***. Yogyakarta: Andi.
- Viktor, Jup, et.all. (2000). ***Doing Criminological Research***. London: Sage Publication.
- Welsh, Brandon C., David P. Farrington. (2007) ***Preventing Crime: What Works for Children, Offenders, Victims and Places***. USA: Springer.
- Hamad, Ibnu. (2005). ***Membumikan Kriteria Kualitas Penelitian***. *Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi*, Vol. IV No.1, Januari-April. Depok: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.